

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 yang ditindak lanjuti dengan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian tanggal 3 Desember 2005.

Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan wilayah, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Dalam rangka pemantapan revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan penguatan terhadap aspek-aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, kebijakan, strategi serta program provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri-ciri : profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global untuk dapat mendukung system agribisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan sistem penyuluhan yang mampu memberdayakan petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui sistem pendidikan non formal, dengan penyelenggaraan revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Revitalisasi penyuluhan dimaksudkan untuk mendudukkan dan memberdayakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk itu sistem penyuluhan perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan petani/nelayan dalam meningkatkan kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajerial, bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki integritas moral yang tinggi.

Dengan demikian diharapkan akan tercipta harmonisasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antar lintas sektor dan bersinergi dalam melakukan pembangunan penyuluhan

dengan potensi sumberdaya dari berbagai peluang yang mampu dimanfaatkan secara berkesinambungan yang komprehensif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 adalah:

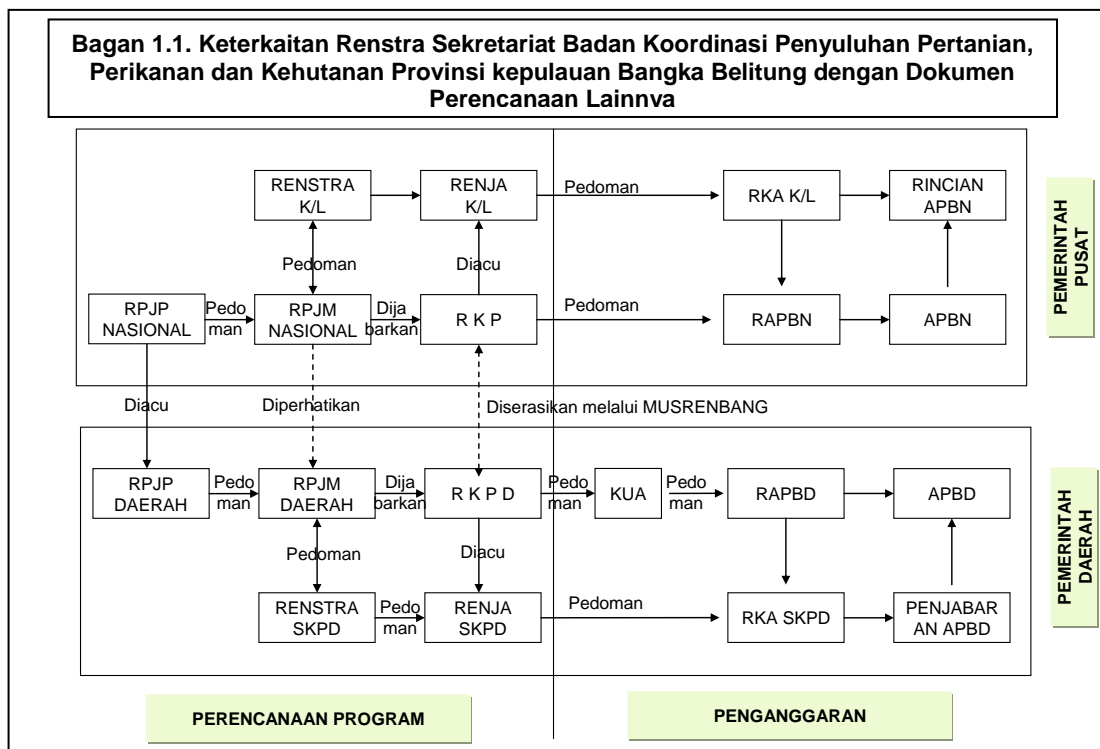
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
-

- tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
-

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 3 Seri A);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
 23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011;
 24. Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Uraian tugas Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 Nomor 2 Seri D);
-

1.3. Hubungan antar Dokumen

Renstra SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 - 2017 serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Secara skematis, konsepsi ideal keterkaitan antardokumen perencanaan ini digambarkan dalam Bagan 1.1.



1.4. Sistematika Dokumen Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017;

- 1.2. DASAR HUKUM PEENYUSUNAN
Mencantumkan peraturan yang melatar belakangi penyusunan Renstra SKPD;
- 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Memberikan penjelasan tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen lain yang relevan
- 1.4. SISTEMATIKAN DOKUMEN RENSTRA SKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD terkait dengan peraturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.
- 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD dan sasaran penyusunan dokumen Renstra SKPD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas SKPD.
- 2.2. SUMBER DAYA SKPD
Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
Menunjukkan tingkat pencapaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2007-2012.
- 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
-

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017;

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013 - 2017;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017;

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 adalah sebagai acuan pembangunan provinsi yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang memuat rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk jangka 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2017.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 adalah sebagai pedoman SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2013-2017.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Badan Koordinasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Fungsi

1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Tugas

1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 2. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
-

3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan.

Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Penyuluhan;
- d. Bidang Kelembagaan;
- e. Bidang Pengembangan SDM;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan Bagian Tata Usaha, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bidang Kelembagaan dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
 - b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
 - c. Advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - d. Penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
-

- e. Pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat provinsi;
- f. Pelaksanaan penyuluhan;
- g. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- i. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani dan nelayan;
- j. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani, nelayan dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
- k. Peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- l. Pelaksanaan tata usaha kesekretariatan.

B. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan perumusan, program penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan pembinaan staf;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Penyelenggara Penyuluhan

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan teknis dan administrasi di bidang program,

program pengembangan metode, pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelayanan teknis dan administrasi di bidang program;
- b. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- c. Penyiapan fasilitas sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan staf;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman, dan standart penyuluh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait;
- d. Pelaksanaan pembinaan staf;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha.

Unutuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan SDM menmpunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan Sumber Daya manusia Penyuluh;
 - b. Penyiapan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
-

- e. Pelaksanaan pembinaan staf;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sesuai dengan kebutuhan dan keahlian di bidang teknis operasional.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat didukung oleh sumber daya yang ada, antara lain :

1. Aparatur Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur yang berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamisator. Jumlah tenaga aparatur yang ada dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1

Klasifikasi PNS dan CPNS di Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	1	-	1
2	Pasca Sarjana/ S2	-	1	1
3	Sarjana / S1	13	5	18
4	Diploma-IV	-	1	1
5	Diploma-III	5	3	8
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	2	-	2
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	Jumlah	21	10	31

2. Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 2

Jumlah Penyuluh per Kabupaten/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung
Tahun 2010

No	Kabupaten/ Kota	Pertanian			Perikanan			Kehutanan			Jml
		PNS	THL- TBPP	APBD	PNS	THL- TBPP	APBD	PNS	THL- TBPP	APBD	
1.	Bangka	25	32	-	-	-	2	-	5	-	64
2.	Bangka Barat	-	42	26	-	-	-	-	3	-	71
3.	Bangka Tengah	4	14	22	-	2	5	1	5	30	83
4.	Bangka Selatan	12	13	14	1	-	3	2	1	-	46
5.	Belitung	28	20	-	-	-	3	2	1	-	54
6.	Belitung Timur	11	20	-	-	-	1	-	1	-	33
7.	Pangkalpinang	4	13	-	3	1	1	-	2	-	24
Total		84	154	62	4	3	15	5	18	30	375

Sumber : Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Jumlah Kelompok Tani

Tabel 3

Jumlah Kelompok Tani di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010

No.	Kabupaten	Kelas Kelompok Tani				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Pangkalpinang	71	-	-	-	71
2	Bangka	525	56	1	-	582
3	Bangka Tengah	291	-	-	-	291
4	Bangka Barat	101	-	-	-	101
5	Bangka Selatan	381	-	-	-	381
6	Belitung	158	-	-	-	158
7	Belitung Timur	113	-	-	-	113
		1640	56	1	-	1697

Sumber : Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Tabel 5

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP), Jumlah Petani dan Luas Areal Budidaya Ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Perikanan	Petani	Areal (Ha)	
1.	Bangka	545	578	36,50	
2.	Bangka Barat	349	349	16,86	
3.	Bangka Tengah	317	644	55.54	
4.	Bangka Selatan	437	893	42.00	
5.	Belitung	205	310	4.96	
6.	Belitung Timur	306	307	7,29	
7.	Pangkalpinang	86	329	124,84	
Jumlah/Total		2010	2.245	3.410	287,99
		2009	2.272	3.625	317,3
		2008	1.554	2.894	307

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan

Tabel 2

Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan BPP per Kabupaten/Kota Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah BPP
1	Bangka	8	9	61	8
2	Bangka Barat	6	4	60	5
3	Bangka Tengah	6	7	50	4
4	Bangka Selatan	7	3	50	2

5	Belitung	5	2	40	3
6	Belitung Timur	7	-	39	3
7	Pangkalpinang	5	36	-	1
		44	61	300	26

Sumber : *Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pada periode tahun 2011, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain :

A. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Output kegiatan ini adalah tersedianya pedoman kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

2. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung

Output kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian angka kredit oleh pejabat yang berwenang kepada Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, Untuk tahun 2011 pada tingkat Provinsi Formasi Pegawai Jabatan Fungsional belum di terbitkan SK Pertama Jabatan Fungsional dari BKD.

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dan Teknis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien,serta terciptanya Koordinasi di Bidang Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan atau Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi.

B. Program Penilaian Penyuluhan dan Petani Teladan,

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan Penilaian Penyuluhan Petani Teladan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya partisipasi pemilihan Penyuluh dan Petani teladan di tingkat Provinsi dan menerima penghargaan di Istana Negara.

C. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan dan Monev Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Output dari kegiatan ini adalah terbinanya serta termonitornya kegiatan penyuluhan yang ada di 7 Kabupaten/Kota

2. Forum Koordinasi Penyuluhan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Output kegiatan ini adalah terlaksananya rapat dan forum koordinasi penyuluhan di lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung serta menyamakan langkah dan tindakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan.

3. Kegiatan Penyelenggaraan PENAS

Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PENAS di Prov. Kalimantan Timur, yang diikuti oleh para penyuluh dan petani yang ada di 7 Kabupaten/Kota.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan di masa mendatang dalam pengembangan pelayanan SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut.

Faktor Tantangan

- Peningkatan pola pikir dan perilaku dari pelaku utama subsisten tradisional menjadi pelaku utama modern berwawasan agribisnis
 - Upaya menjadikan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda
 - Menjadikan kelembagaan pelaku utama sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang solid dan kuat
 - Mengupayakan jumlah penyuluh sesuai dengan kebutuhan sesuai kebijakan jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang
-

dipersyaratkan melalui penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta

- Mendorong peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan P4S
- Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan non aparatur
- Penataan aset-aset yang belum terselesaikan dengan baik
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi

Faktor Peluang

- Komitmen Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Menetapkan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai salah satu sektor unggulan
- Potensi Sumberdaya Alam, Luas Lahan dan Sumberdaya Manusia
- Tersedianya Potensi Daerah Irigasi
- *Trade Mark* Lada Putih
- Budaya Pangan Lokal
- Potensi Integrasi Perkebunan dan Peternakan, Pangan, Hortikultura dan Agroindustri
- Potensi Hutan Tanaman
- Potensi budidaya air tawar dan payau;
- Potensi sumber daya perikanan tangkap

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan
 - 1) Adanya perbedaan persepsi antara pimpinan kelembagaan eksekutif dan legislatif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;
 - 2) Belum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
-

- 3) Masih belum terbentuknya kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sehingga berakibat pada :
 - Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kurang berjalan dengan baik;
 - Penyelenggaraan penyuluhan kurang efektif, karena fungsi penyuluhan masih bercampur dengan fungsi pengaturan dan pelayanan
 - 4) Ketenagaan belum semua kecamatan memiliki BP3K/lembaga yang menangani penyuluhan;
 - 5) Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan di berbagai tingkatan belum tertata dengan baik, sehingga penyelenggaraan penyuluhan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik;
 - b. Kerjasama kemitra sejajaran antara kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya belum berjalan optimal
 - 1) Kompetensi penyuluh pertanian masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 2) Belum terpenuhinya penempatan satu desa satu penyuluh pertanian;
 - 3) Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian melalui diklat masih kurang;
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Penyusunan program penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 2) Penyelenggaraan penyuluhan belum berjalan sesuai prinsip-prinsip partisipatif;
 - 3) Kegiatan penyuluhan masih bersifat parsial dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
 - 4) Materi dan metode penyuluhan belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah;
 - 5) Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan;
 - 6) Kurangnya informasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama yang spesifik lokalita;
 - 7) Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota baik melalui dana dekonsentrasi, Dana
-

Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD, maupun kontribusi dari pelaku utama dan swasta masih sangat terbatas;

- 8) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tunjangan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dan kegiatan operasional penyuluhan dialihkan untuk kegiatan lain;
- 9) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di daerah.

d. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang terkait kelautan perikanan antara lain :

- 1) Tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam berakibat pada penurunan ketersediaan dan kerusakan;
- 2) Meluasnya alih fungsi lahan, berakibat pada penurunan produksi;
- 3) Belum optimalnya usaha perikanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional;
- 4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kelautan Perikanan dan institusi pengelola;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan teknologi terapan oleh masyarakat kelautan dan perikanan;
- 6) Terbatasnya ketersediaan dan informasi Sumber Daya Alam (terutama terkait adaptasi dan mitigasi).

e. Bidang Kehutanan

- 1) Kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya tanaman kayu kehutanan sesuai dengan anjuran;
- 2) Kurangnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan;
- 3) Kurangnya pemahaman petani tentang batas-batas kawasan hutan dan sadar akan pentingnya kelestarian hutan;
- 4) Kurangnya pengetahuan petani tentang peraturan UU Kehutanan yang menyangkut hak dan kewajiban, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya kehutanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka tugas dan fungsi SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mewujudkan Misi ke-1 yaitu **Pengembangan ekonomi kerakyatan** melalui penguatan kapasitas

lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.

Misi tersebut mempunyai tujuan:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
- b. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung.

Adapun Sasaran untuk pencapaian tujuan tersebut, antara lain :

- a. Penguatan kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
- c. Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah
- d. Meningkatnya daya beli masyarakat
- e. Terbukanya lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan:

1. Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional
2. Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan.
3. Upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah.
4. pengembangan desa mandiri yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru.

Kebijakan umum untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Kebijakan menumbuhkembangkan usaha kecil menengah dan fungsionalisasi pasar tradisional secara optimal
-

2. Kebijakan peningkatan peran koperasi guna mendukung perekonomian masyarakat
3. Kebijakan peningkatan kualitas SDM usaha kecil menengah dan koperasi yang handal, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif.
4. Kebijakan pemberdayaan UKM skala kecil dan mikro
5. kebijakan inisiasi dan pendampingan pengembangan produk unggulan
6. kebijakan mendorong dan mengasistensi perda-perda terkait UMKM
7. Kebijakan mendorong peningkatan PDRB Sektor Pertanian
8. Kebijakan pengembangan industri hilir yang berbasis pengelolaan SDA
9. kebijakan mendorong pemanfaatan teknologi industri
10. kebijakan pengembangan ekonomi pesisir
11. Kebijakan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat
12. kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat
13. Kebijakan penataan regulasi industri dan dokumen perencanaan ekonomi
14. Kebijakan peningkatan nilai tukar petani
15. Kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
16. Kebijakan memperkuat ketahanan pangan
17. Kebijakan pengembangan dan penguatan sektor peternakan
18. Kebijakan pengembangan perencanaan kehutanan dan rehabilitasi alam
19. kebijakan pengembangan dan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan kelautan
20. kebijakan peningkatan akses listrik di pedesaan
21. Kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L

Melalui hasil telaahan Renstra K/L faktor-faktor permasalahan maupun tantangan, antara lain :

Faktor Permasalahan

- Kualitas dan produktivitas pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan pada umumnya masih relatif rendah
-

- Minat generasi muda terhadap sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menurun
- Aksesibilitas pelaku utama terhadap teknologi, permodalan dan informasi pasar masih lemah
- Kelembagaan pelaku utama masih lemah sehingga posisi tawarnya rendah
- Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2006
- Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan belum mencukupi untuk mendukung kebijakan ideal jumlah penyuluh
- Penyebaran dan kualitas pusat pelatihan yang diselenggarakan petani (P4S) belum merata
- Belum semua aparatur dan non aparatur mengikuti diklat manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis
- Penataan aset-aset belum terselesaikan dengan baik
- Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal

Faktor Tantangan

- Peningkatan pola pikir dan perilaku dari pelaku utama subsisten tradisional menjadi pelaku utama modern berwawasan agribisnis
 - Upaya menjadikan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda
 - Menjadikan kelembagaan pelaku utama sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang solid dan kuat
 - Mengupayakan jumlah penyuluh sesuai dengan kebutuhan sesuai kebijakan jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipersyaratkan melalui penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta
 - Mendorong peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan P4S
 - Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan non aparatur
 - Penataan aset-aset yang belum terselesaikan dengan baik
 - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi
-

Telaahan Renstra SKPD

Melalui hasil telaahan Renstra SKPD faktor-faktor penghambat maupun pendorong, antara lain :

Faktor Pendorong

- Komitmen Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Menetapkan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai salah satu sektor unggulan
- Potensi Sumberdaya Alam, Luas Lahan dan Sumberdaya Manusia
- Tersedianya Potensi Daerah Irigasi
- *Trade Mark* Lada Putih
- Budaya Pangan Lokal
- Potensi Integrasi Perkebunan dan Peternakan, Pangan, Hortikultura dan Agroindustri
- Potensi Hutan Tanaman
- Potensi budidaya air tawar dan payau;
- Potensi sumber daya perikanan tangkap

Faktor Penghambat

- Produktifitas Lahan, Usahatani dan Produksi Pertanian Rendah
 - Terbatasnya SDM Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang Berkualitas
 - Pengrusakan Lingkungan Usaha Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian
 - Penebangan dan Perambahan Hutan Secara Liar
 - Perubahan Profesi Petani/peternak/nelayan ke usaha lain
 - Ketergantungan Impor Bahan Pokok Pangan Cukup Tinggi
 - Keterbatasan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - Kurangnya Modal dan Akses Usaha bagi pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2006
 - Kelembagaan pelaku utama masih lemah sehingga posisi tawarnya rendah
-

- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan petugas tentang kemitraan
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan teknologi terapan oleh masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

A. Faktor Lingkungan

Kondisi kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data tahun 2004 telah mencapai 38 %. Hal ini diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke areal pertambangan rakyat (Tambang Inkonvensional), kondisi ini dinilai akan menjadi penghambat pencapaian kinerja.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian diakibatkan minimnya tenaga kerja di sektor pertanian karena banyak yang alih fungsi tenaga kerja ke sektor pertambangan, kondisi ini dinilai akan menjadi penghambat pencapaian kinerja pelayanan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

A. Penyiapan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan

Keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Masyarakat kini juga sudah dapat menilai kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik yang diberikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melayani publik harus dapat mempersiapkan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan serta merumuskan kebijakan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan harus sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis.

B. Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dibidang programa, pengembangan metode, materi penyuluhan dan kemitraan usaha

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Programa Penyuluhan adalah perencanaan tertulis yang disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahunan serta tahun berikutnya untuk waktu yang akan datang sesuai dengan waktu dan keadaan serta menempatkan dengan memperhatikan siklus anggaran, keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan sesuai dengan tingkatan antarlain propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Programa Penyuluhan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya wilayah dengan di sesuaikan untuk kebutuhan yang akan dilaksanakan di setiap tingkatan, agar dapat terarah dan merupakan pedoman dalam pengendalian untuk pencapaian tujuan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang dapat terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dapat dilakukan dengan melalui partisipatif, terpadu, transparansi, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP)

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian, merupakan dana yang digunakan untuk penyuluh pertanian, sebagai dana operasional penyuluh propinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Diharapkan dengan adanya BOP dapat meningkatkan motivasi kerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan disamping itu juga untuk

mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan. Dana BOP yang tersedia adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyuluh sesuai rencana kerja tahunan penyuluh yang merupakan penjabaran dari program penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yaitu (1) program penyuluhan di setiap tingkatan yang telah diverifikasi; (2) rencana kerja tahunan penyuluh di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (3) data peta wilayah untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan; (4) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi petani dan usaha formal (lembaga usaha formal lainnya); (6) terwujudnya kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan; (7) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dan pemasaran; (8) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja; (9) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama di wilayah kerjanya. Dalam hal ini untuk penilaian kinerja penyuluh dikaitkan juga dengan pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh yang dilakukan oleh tim .

- **Penyelenggaraan Forum Penyuluhan**

Penyelenggaraan Forum Penyuluhan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan, memadukan, menyetarakan dan menyelaraskan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan secara lebih produktif, partisipatif, efisien dan efektif. Penyelenggaraan Forum Penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan Komisi Penyuluhan, termasuk memfasilitasi pembentukannya bila belum ada, dan atau forum-forum penyuluhan yang diperluas dengan mengikutsertakan

seluruh *stakeholders* dalam rangka mengkoordinasikan, memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyuluhan secara efektif dan efisien, dengan sasaran anggota Komisi Penyuluhan, pejabat/petugas dinas lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan serta instansi terkait lainnya, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta *stakeholders* lainnya dengan output yang diharapkan adalah terselenggaranya pertemuan Komisi Penyuluhan dan forum-forum penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diperluas dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* dalam rangka mengkoordinasikan, memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyuluhan secara efektif dan efisien.

- **Penyebaran Informasi Penyuluhan**

Penyebaran Informasi Penyuluhan dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu para penyelenggara penyuluhan perlu terus meningkatkan pelayanan informasi, baik informasi teknologi, harga, pasar, permodalan, maupun informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Kegiatan penyebaran informasi penyuluhan dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang didanai oleh APBD atau sumber lain yang tidak mengikat. Penyebarluasan materi penyuluhan didukung oleh penggunaan media cetak dalam bentuk brosur, folder, leaflet, poster atau media elektronik dalam bentuk siaran pedesaan melalui kerjasama dengan RRI daerah, radio swasta daerah, stasiun TVRI daerah atau TV swasta. Materi penyuluhan disesuaikan dengan dengan kebutuhan utama pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka peningkatan produktivitas usahanya serta pengembangan komoditas unggulan di daerah, serta dalam upaya membangun sistem peringatan dini terhadap ancaman serangan hama penyakit (hapen), banjir, kekeringan, perubahan cuaca, iklim, dll. Tujuan dan output penyebaran informasi penyuluhan adalah : (1) meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat pertanian di perkotaan dan dipedesaan tentang perkembangan informasi inovasi teknologi, harga, pasar, permodalan, iklim, cuaca, serangan hama penyakit maupun

informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya; (2) meningkatkan akses para penyuluh terhadap sumber informasi pertanian dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku utama dan pelaku usaha; (3) mengembangkan wawasan dan pengetahuan penyuluh; (4) menyediakan topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh mengenai pembangunan pertanian dan penyuluhan, guna melihat kelayakan penerapannya ditingkat pelaku utama dan pelaku usaha; (5) melengkapi bahan bacaan sebagai sumber informasi. Penyebaran informasi penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik. Penyelenggaraan PENAS serta kegiatan Jambore Nasional Pramuka Sakatarunabumi kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan para kontaktani dan anggota kelompok KTNA.

- **Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Supervisi dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah, baik yang di biayai oleh APBN melalui dana dekonsentrasi, maupun dana APBD, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Monitoring dimaksudkan untuk memastikan ketepatan penggunaan input/sumberdaya penyuluhan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari suatu kegiatan yang diharapkan. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan secara sistemik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk formulir yang dibakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan). Tujuan dan output yang diharapkan adalah (1) mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan; (2) mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan; (3) membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel; (4) mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai dengan

indikator yang ditetapkan; (5) menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulan dan tahunan).

C. Optimalisasi pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha

Pengelolaan ekonomi yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan adalah langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan menguatkan UMKM dan Koperasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, dan hasil laut. Apabila langkah tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka Bangka Belitung dapat bersaing dengan daerah lain yang notabahnya lebih maju.

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Belitung selama ini belum berjalan secara optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Belitung, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Oleh karena itu perlu optimalisasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia baik penyuluh PNS, Swadaya, Swasta, serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan.

D. Optimalisasi pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh

- Manajemen Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Permasalahan dalam aspek manajemen Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi antara lain keadaannya adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baru terlaksana melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan Nomor : 43 tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008. Sumberdaya Manusia yang menduduki jabatan yang ada sesuai dengan struktur organisasi masih belum terpenuhi dan masih rendahnya peranan dalam mengkoordinir dan pelaksanaan

beban kerja masih tumpang tindih. Tugas pokok dan fungsi kerja yang terbentuk dibawah manajemen penyuluhan belum efisien terutama dalam pengambilan kebijakan masih belum sejalan dengan kebijakan pusat. Koordinasi antara Badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan baru terbentuk 2 (dua) Bapeluh Kabupaten (campuran) yang selebihnya masih menginduk pada satu Dinas. Diperlukan sosialisasi untuk pembentukan Bapeluh pada Kabupaten/kota yang masih belum membentuk wadah Badan pelaksana penyuluhan, agar dapat menjalin koordinasi baik Badan koordinasi penyuluhan dan Badan pelaksana penyuluhan provinsi/kabupaten/kota serta pos penyuluh - pos penyuluh yang ada di Kecamatan untuk merumuskan program kerja dalam lingkup penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan .

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

A. Visi

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai Visi 2013 - 2017 yaitu :

“Terwujudnya penyuluh dan kelompok tani/peternak/nelayan yang handal”

B. Misi

1. Melaksanakan penyiapan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan
 2. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan;
-

3. Melaksanakan dan menyiapkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha
4. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

A. Tujuan

1. Meningkatkan penyiapan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan
2. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha
4. Meningkatkan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh

B. Sasaran

1. Meningkatkan kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya pemerintah yang bersih dan tatakelola pemerintahan yang baik
 2. Terlaksananya penyiapan pelayanan teknis dan administratif di bidang program dan pengembangan metode, dan pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha, serta Publikasi.
 3. Terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan sumber daya manusia penyuluhan
-

4. Terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembinaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
2. Pembentukan dan pengembangan Tim Verifikasi Programa Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan provinsi
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan menempatkan satu desa satu penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
4. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani dan Swasta.
 2. Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilakukan berdasarkan suatu programa yang disusun bersama antara penyuluh dan petani
 3. Penempatan 1 (satu) orang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pada setiap desa dalam rangka pengembangan 1 (satu) desa 1 (satu) komoditi unggulan
 4. Pendirian kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
-

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Penyuluhan Pertanian

Arah kebijakan Penyuluhan Pertanian difokuskan dalam mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu:

- a. terwujudnya swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- b. peningkatan diversifikasi pangan;
- c. peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
- d. peningkatan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat
 - b. Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta.
 - c. Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan.
 - d. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
 - e. Pendidikan tinggi kedinasan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina.
 - f. Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
 - g. Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional.
 - h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
-

Mengacu pada tujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah sebagai berikut.

- a. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.
- b. Penataan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani.
- c. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga pelatihan pertanian swadaya (P4S) sebagai pusat pelatihan dan permagangan bidang agribisnis bagi masyarakat tani.
- e. Penumbuhan wirausahawan muda di bidang agribisnis dilakukan melalui *agri-training camp*, magang, pelatihan kewirausahaan pertanian, dan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- f. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian kedinasan.
- g. Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
- h. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah.
- i. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang penyuluhan serta teknis dan kewirausahaan agribisnis.
- j. Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

A. Program dan Kegiatan

1. Program

Untuk melaksanakan strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pada periode 2013 - 2017, telah ditetapkan program dengan nomenklatur “**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani**”.

2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Implementasi dari program BPPSDMP tersebut dilakukan SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut.

- Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
- Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya.

1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian meliputi: penataan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani, serta pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian.

a. Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Pengawasan penerbitan peraturan perundang-undangan penyuluhan pertanian.
- Penataan Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan, sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006.
- Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.
- Perencanaan ketenagaan penyuluh pertanian, serta fasilitasi penyelesaian Penyuluh Pertanian Honorer dan THL-TB PP
- Identifikasi dan penetapan petani sukses menjadi penyuluh swadaya.

b. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

- Fasilitasi penumbuhan Gapoktan melalui program pemberdayaan masyarakat tani dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.

c. Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan program penyuluhan pertanian nasional mendukung empat sukses pembangunan pertanian, serta mengantisipasi perubahan lingkungan dan kelestarian lingkungan.
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
 - Pengembangan *cyber extension* untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
-

d. Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi.

- Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian.

2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

a. Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

- Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup BPPSDMP.

b. Pemantapan Sistem Perencanaan

- Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

c. Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

- Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

d. Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Pengelolaan kehumasan dan ketatausahaan.

3. Kegiatan dan Indikator

Seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga di akhir periode 2013-2017, diharapkan semua target program dan kegiatan tersebut dapat dicapai. Secara rinci kegiatan, indikator output, dan outcome kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

5.2. Penyuluhan Kehutanan

Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur kehutanan dan SDM kehutanan lainnya. Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan penyuluhan kehutanan antara lain :

1. Meningkatkan sistem penyuluhan kehutanan yang aplikatif;
 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan;
-

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur kehutanan serta SDM kehutanan lainnya;
 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Beberapa kegiatan penyuluhan kehutanan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Fasilitasi Pengembangan Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA)
2. Pelatihan Keterampilan Masyarakat
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan
4. Biaya Operasional Penyuluh
5. Percontohan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pembentukan/Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP)
7. Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)
8. Penyelenggaraan Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda (GBPP)
9. Penyelenggaraan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)
10. Pelaksanaan Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM)
11. Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari

5.3. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang ingin dicapai antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha alternatif
2. Ketahanan Pangan dengan menjamin ketersediaan sumberdaya ikan sebagai sumber pangan penting
3. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dengan upaya pengelolaan konservasi, mitigasi dan adaptasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik melalui pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar; dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola melalui peningkatan efektivitas peraturan perundangan dan hukum laut

Kebijakan terkait SDM kalautan perikanan :

1. Meningkatkan pengetahuan nelayan/pembudidaya ikan
2. Meningkatkan kemampuan/ketrampilan serta penguatan dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan
4. Mengembangkan dukungan Iptek serta diseminasinya kepada masyarakat Kelautan Perikanan

Sasaran kegiatan penyuluhan kelautan perikanan adalah meningkatkan kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam pengembangan usaha perikanan. Beberapa komponen dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Komponen kegiatan dalam penguatan dan pengembangan kelembagaan :
 - a. Pembinaan kelembagaan penyuluhan perikanan pemerintah
 - b. Penguatan kelembagaan penyuluhan perikanan di kawasan minapolitan dan kawasan potensi perikanan
 - c. Pembinaan terhadap organisasi profesi penyuluh perikanan
 - d. Sinkronisasi kegiatan penyuluhan perikanan dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan tingkat propinsi
 - e. Pembinaan dan penumbuh kembangan kelompok pelaku utama perikanan
 2. Komponen kegiatan dalam penguatan dan pengembangan Ketenagaan :
 - a. Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan di kawasan minapolitan dan kawasan potensi perikanan
 - b. Sertifikasi kompetensi penyuluh perikanan PNS di kawasan minapolitan dan kawasan potensi perikanan
 - c. Penilaian penyuluh perikanan teladan nasional di kawasan minapolitan prioritas dan kawasan potensi perikanan
 - d. Penilaian dan penetapan angka kredit penyuluh perikanan
 - e. Pembinaan penyuluh perikanan di kawasan minapolitan
 3. Komponen kegiatan dalam penguatan dan pengembangan Penyelenggaraan penyuluhan :
 - a. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan perikanan di kawasan minapolitan dan kawasan potensi perikanan oleh penyuluh perikanan PNS (BOP)
-

- b. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan perikanan di kawasan minapolitan dan kawasan potensi perikanan oleh penyuluh perikanan tenaga kontrak (PPTK)
- c. Gerakan nasional masyarakat minapolitan (Gempita)
- d. Penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat propinsi dan kabupaten
- e. Pameran dan promosi penyuluhan kelautan perikanan
- f. Pembuatan dan distribusi materi penyuluhan perikanan
- g. Penerapan dan pengembangan model penyuluhan partisipatif
- h. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pos pelayanan penyuluhan minapolitan
- i. Percontohan inovasi teknologi perikanan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2013-2017, sekaligus juga sebagai pedoman DPRD dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (2013-2017) adalah:

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih telah menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017, antara lain :

1. **Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.**
2. **Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas SDM (Society Empowerment)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. **Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh** untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. **Perwujudan good governance dan clean government** melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Dalam prioritas pembangunan daerah tersebut, pembangunan Sekretariat Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2013 – 2017 terkait dengan misi ke-I dari 5 (lima) misi prioritas daerah, yaitu :

Misi I:

Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan /kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi

wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.

Tujuan, Sasaran Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi ini adalah :

1. Tujuan

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.

2. Sasaran :

Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah

3. Strategi :

Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan.

4. Arah Kebijakan

- a. kebijakan inisiasi dan pendampingan pengembangan produk unggulan
- b. Kebijakan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

BAB VII. P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 merupakan acuan Lingkup Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan program kerja selama tahun 2013-2017. Renstra tersebut dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksana dan penanggungjawab yang akan dilakukan oleh Lingkup Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Renstra tersebut dapat dimanfaatkan oleh unit kerja terkait dalam sinkronisasi program dan kegiatan, serta digunakan oleh unit kerja lainnya dalam koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis pembangunan penyuluhan akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin para aparat serta peran aktif masyarakat. Untuk itu, segenap aparatur di bidang penyuluh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bersungguh-sungguh melaksanakan program dan rencana pembangunan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013-2017 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata sehingga terwujudnya penyuluhan akan lebih tepat sasaran dan terpadu serta tercapainya tujuan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera adil dan berdaya saing global.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2012 - 2017

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	VISI BAKORLUH	MISI BAKORLUH	ISI-ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	4	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN															
BAGIAN TATA USAHA															
														PROGRAM	KEGIATAN
1	“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.	MISI RPJMD PROV. Misi ke-1 dari 5 misi “Mengembangkan ekonomi kerakyatan” melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.	Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah	Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan.	Kebijakan inisiasi dan pendampingan pengembangan produk unggulan	“Terwujudnya penyuluh dan kelompok tani/peternak/nelayan yang handal”	Melaksanakan penyusunan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan	Belum optimalnya kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan	Meningkatkan penyuluhan kebijakan perumusan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan perlengkapan	Meningkatkan kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya pemerintah yang bersih dan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani dan Swasta.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup Sekretariat Bakorluh P2K
						Kebijakan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat									
														Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Perikanan dan kehutanan
														Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup Sekretariat Bakorluh P2K
														Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan
															Penyebarluasan Informasi Pembangunan

															Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan
																Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
															BIDANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN	
															PROGRAM	KEGIATAN
								Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan	Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dibidang program, pengembangan metode, materi penyuluhan dan kemitraan usaha	Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan	Terlaksananya penyiapan pelayanan teknis dan administratif di bidang program dan pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha, serta Publikasi.	Pembentukan dan pengembangan Tim Verifikasi Program Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan provinsi	Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilakukan berdasarkan suatu program yang disusun bersama antara penyuluh dan petani	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penataan Badan Pelaksana Penyuluhan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan, sesuai dengan undangundang nomor 16 tahun2006.	
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mendukung empat sukses pembangunan pertanian,
															Peningkatan Penerapan Teknoplgi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan cyber extension
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyelenggaraan Forum Penyuluhan
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Rapat Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

													BIDANG PENGEMBANGAN SDM			
													PROGRAM	KEGIATAN		
								Melaksanakan dan menyiapkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha	Belum optimalnya pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha	Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha	Terlaksananya penyusunan kebijakan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan sumber daya manusia penyuluhan	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan menempatkan satu desa satu penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Penempatan 1 (satu) orang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pada setiap desa dalam rangka pengembangan 1 (satu) desa 1 (satu) komoditi unggulan	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja	
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi penyuluh PNS, swadaya, Honorer, petugas teknis lainnya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lain
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Studi pembelajaran ke luar negeri mengenai kegiatan usaha di bidang Agro industri, Agro Forestry dan Agro Fishery
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pelatihan Keterampilan Dasar Penyuluhan Kehutanan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Pelatihan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Pelatihan Keterampilan Masyarakat Kehutanan (30 orang/angkatan)
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Identifikasi dan

													BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN			
													PROGRAM	KEGIATAN		
									Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh	Belum optimalnya pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh	Meningkatkan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart penyuluh	Terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembinaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku	Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi	Pendirian kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Fasilitasi penumbuhan Gapoktan melalui program pemberdayaan masyarakat tani, dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penilaian Penyuluh, kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha teladan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan Kelautan dan perikanan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pembinaan dan Pendampingan kepada kelompok penerima bantuan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan kehutanan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengawasan dan Pendampingan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengawasan dan Pendampingan SPKP dan KUP penyuluhan kehutanan
															Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Penilaian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha penyuluhan kehutanan (14 kategori)
															Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyusunan laporan kegiatan kelembagaan penyuluhan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Anggaran Kegiatan
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ANGGARAN/PAGU INDIKATIF (Rp.juta)						SUMBER DANA
					Awal	2013	2014	2015	2016	2017	AWAL	2013	2014	2015	2016	2017	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
											1,689	9,001	10,827	11,977	13,175	14,717	APBD/APBN
	BAGIAN TATA USAHA										12.5	250	247.5	372.25	409.475	475.4225	
	PROGRAM	KEGIATAN															
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup Sekretariat Bakorluh P2K	Penataan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan Sekretariat Bakorluh P2K melalui 1 dokumen revisi Struktur Kelembagaan Sekretariat Bakorluh P2K dan 5 paket dokumen administrasi kepegawaian untuk Sekretariat Bakorluh P2K	Jumlah produk hukum dan dokumen yang terselesaikan	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	APBD
				Jumlah dokumen administrasi ketenagaan yang terselesaikan	1	1	1	1	1	1	0	5	5.5	6.1	6.7	7.3	APBD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Perikanan dan kehutanan	Restrukturisasi program dan anggaran berbasis kinerja Sekretariat Bakorluh P2K, setiap tahun	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	1	1	1	1	1	1	0	20	22	24.2	26.6	29.3	APBD
				Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun	1	1	1	1	1	1	0	15	16.5	18.2	20.0	22.0	APBD
				Jumlah Rencana Strategis Sekretariat Bakorluh P2K	1	1	0	0	0	0	0	15	0	0.0	0	0	APBD
				Jumlah Rencana Kerja Sekretariat Bakorluh P2K	1	1	1	1	1	1	0	15	16.5	18.2	20.0	22.0	APBD
				Jumlah Laporan Kinerja Sekretariat Bakorluh P2K Lima Tahun	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0	0	25	APBD
				Jumlah Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Bakorluh P2K	1	1	1	1	1	1	0	10	11	12.1	13.3	14.6	APBD
				Jumlah Dokumen Penyusunan Statistik Penyuluhan (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)	2	3	3	3	3	3	0	45	49.5	54.5	59.9	65.9	APBD

	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.	Fasilitasi pembentukan 361 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.	Jumlah Posluhdes yang terbentuk	0	0	7	7	7	7	0	0	70	77	85	93	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mendukung empat sukses pembangunan pertanian, pembangunan perikanan dan kehutanan	Penetapan satu program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan RKT yang mendukung 4 sukses pembangunan pertanian, pembangunan perikanan dan kehutanan, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender	Jumlah program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan RKT yang ditetapkan setiap tahun	1	1	1	1	1	1	50	116	128	140	154	170	APBD
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan cyber extension	Tersedianya sistem informasi dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang disebarluaskan melalui cyber extension.	Jumlah materi penyuluhan (sektor pertanian, perikanan dan kehutanan) yang disebarluaskan melalui cyber extension	0	0	3	3	3	3	0	0	30	33	36	40	APBN
				Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi dan materi penyuluhan (cyber extension) di 26 BPP/K	0	0	2	2	2	2	0	0	170	187	206	226	APBN
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyelenggaraan Forum Penyuluhan	Peningkatan koordinasi, keterpaduan, keserasian dan keselarasan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyuluhan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Forum penyuluhan (per-semester)	1	1	2	2	2	2	50	190	209	230	253	278	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Rapat Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan kegiatan penyuluhan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Rapat Koordinasi (per-triwulan)	0	0	4	4	4	4	0	0	120	132	145	160	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pembinaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan kinerja penyuluh dalam kegiatan penyuluhan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan dan monev penyuluhan	0	1	1	1	1	1	0	300	330	363	399	439	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Fasilitasi dan Pengembangan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan	Terfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan di BPP/BPK di kabupaten/kota	Jumlah BPP/BPK yang terfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan penyuluhannya	3	7	7	7	7	7	153	265	292	321	353	388	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Apel Siaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Rapat Teknis Penyuluhan)	Peningkatan kesamaan gerak langkah dalam aksi-aksi kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang termotivasi dan kesamaan gerak langkah kinerjanya	0	469	500	500	500	500	0	686	755	830	913	1004	APBD

	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyelenggaraan Pentas Event Nasional/Regional (Penas, Jambore, Pameran dll)	Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan melalui keikutsertaan dalam Event Nasional	Terlaksananya keikutsertaan Event Nasional (Paket Kegiatan)	0	1	1	1	1	1	0	542	596	656	721	794	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	a Jumlah Laporan Kegiatan Penghijauan oleh Kelompok GBPP	2	0	1	1	1	1	0	0	40	44	48	53	APBN
				b Laporan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)	4	0	1	1	1	1	0	0	50	55	61	67	APBN
				c Jumlah lokasi sekolah kegiatan Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM)	26	10	10	10	10	10	50	50	55	61	67	73	APBN
				d Jumlah informasi Materi Penyuluhan yang tersebar Melalui Media Cetak	4	2	2	2	2	2	0	16	18	19	21	23	APBN
				e Jumlah Laporan Hasil Pembinaan/Monev Penyuluhan Kehutanan	2	1	1	1	1	1	0	45	50	54	60	66	APBN
				f Jumlah rancangan Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu yang disusun	1	0	1	1	1	1	0	0	10	11	12	13	APBN
				g Jumlah Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu yang terbentuk	0	1	1	1	1	1	0	90	0	90	99	109	APBN/APBD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan	Dokumen pelaporan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan	Jumlah laporan Dokumentasi evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penyuluhan yang tersusun	1	0	1	1	1	1	1.5	0	5.0	5.5	6.1	6.7	APBN

BIDANG PENGEMBANGAN SDM											557	4,198	5,178	5,696	6,266	6,892		
PROGRAM	KEGIATAN																	
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja	Peningkatan kompetensi bagi penyuluh PNS, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian melalui pelatihan pertanian yang mendukung reformasi birokrasi, empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender	Jumlah aparaturnya pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	0	0	20	20	20	20	20	0	0	100	110.0	121.0	133.1	APBD/APBN	
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi penyuluh PNS, swadaya, Honorer, petugas teknis lainnya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lain	Peningkatan kompetensi bagi penyuluh PNS, swadaya, honorer, petugas teknis lainnya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya melalui pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja	Jumlah aparaturnya dan non aparaturnya yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan permagangan	1	30	60	60	60	60	71	105	200	220.0	242.0	266.2	APBD		
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian	Penyediaan fasilitasi sertifikasi profesi 40 penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi	0	0	8	8	8	8	0	0	80	88.0	96.8	106.5	APBD		
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Studi pembelajaran ke luar negeri mengenai kegiatan usaha di bidang Agro industri, Agro Forestry dan Agro Fishery	Peningkatan wawasan petugas, penyuluh, pihak terkait dalam kegiatan penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan study pembelajaran ke luar negeri	1	9	5	5	5	5	71	367	404	444	488	537	APBD		
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Pelatihan Keterampilan Dasar Penyuluhan Kehutanan	Peningkatan kapasitas penyuluh	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dasarnya	5	0	5	5	5	5	0	0	155	171	188	206	APBD/APBN		
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Pelatihan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)	Pendampingan kegiatan KMDM	Terselenggaranya kegiatan pelatihan KMDM (1 angkatan, 30 orang)	0	1	1	1	1	1	0	25	75	83	91	100	APBN		
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Pelatihan Keterampilan Masyarakat Kehutanan (30 orang/angkatan)	Pendampingan kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat	0	1	1	1	1	1	0	24	120	132	145	160	APBN		
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Identifikasi dan penetapan petani/peternak/nelayan sukses menjadi penyuluh swadaya	Pemanfaatan petani/nelayan sukses menjadi penyuluh swadaya.	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Swadaya yang menyelenggaraan	40	40	40	40	40	40	50	50	55	61	67	73	APBN		

	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	a Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60	30	30	30	30	30	0	70	77	85	93	102	APBN
	Peningkatan Kesejahteraan Petani			b Jumlah masyarakat kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	300	30	30	30	30	30	0	150	165	182	200	220	APBN
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Perencanaan ketenagaan penyuluh pertanian PNS, Honor, dan THL-TB PP.	Fasilitasi BOP bagi 93 penyuluh PNS dan Honor+BOP 175 THL-TBPP, serta 107 Honor+BOP Penyuluh Honor Daerah	Jumlah penyuluh PNS yang mendapat BOP	66	93	93	93	93	93	254	358	394	433	476	524	APBN
				Jumlah THL-TBPP yang diberi honor dan BOP	135	175	175	175	175	175	1,979	2600	2860	3146	3461	3807	APBN
				Jumlah Penyuluh Honor Daerah yang diberi honor dan BOP	0	107	107	107	107	107	0	214	235	259	285	313	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	BOP Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan/Pembayaran BOP (orang)	24	28	50	50	50	50	0	108	119	131	144	158	APBN
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	BOP Penyuluhan Kelautan dan perikanan	Peningkatan kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	a Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang menyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dengan Optimalisasi BOP	5	11	11	11	11	11	52	52	57	63	69	76	APBN
				b Jumlah penyuluh perikanan yang dibina	45	45	45	45	45	45	56	70	77	85	93	102	APBN
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan kegiatan pengembangan SDM penyuluhan	Dokumen pelaporan kegiatan pengembangan SDM penyuluhan	Jumlah laporan Dokumentasi evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan pengembangan SDM penyuluhan yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1,5	5	6	6	7	7	

	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengawasan dan Pendampingan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)	Pendampingan kegiatan UPPK	Terbina dan termonitornya kegiatan UPPK	0	1	1	1	1	1	0	50	55	61	67	73	APBN
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengawasan dan Pendampingan SPKP dan KUP penyuluhan kehutanan	Pendampingan kegiatan SPKP dan KUP	Terbina dan termonitornya kegiatan SPKP dan KUP	0	8	12	16	20	24	0	30	33	36	40	44	APBN
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Penilaian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha penyuluhan kehutanan (14 kategori)	Pendampingan kegiatan penilaian	Terpilihnya pelaku utama dan pelaku usaha teladan (kategori)	0	6	21	21	21	21	0	189	208	229	252	277	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Penyusunan laporan kegiatan kelembagaan penyuluhan	Dokumen pelaporan kegiatan kelembagaan penyuluhan	Jumlah laporan Dokumentasi evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan kelembagaan penyuluhan yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1,5	5	6	6	7	7	APBN
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Rapat Pembentukan Komisi penyuluhan	Optimalisasi upaya pemberdayaan petani, petugas serta sistem penyuluhan dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terbentuknya Komisi Penyuluhan	0	0	1	0	0	0	0	0	180	0	0	0	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Operasionalisasi Komisi Penyuluhan	Optimalisasi peran komisi penyuluhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Berfungsinya Komisi Penyuluhan dalam merumuskan arah, kebijakan, strategi dan pemecahan masalah penyuluhan	0	0	0	1	1	1	0	0	0	75	83	91	APBD
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Rapat Pembentukan Perhimpunan	Optimalisasi peranan organisasi profesi secara aktif dan teratur mengembangkan ilmu penyuluhan pertanian dan penerapannya bagi pengembangan pertanian progresif dan kemakmuran bangsa yang merata.	Terbentuknya organisasi profesi yang berbentuk perhimpunan	0	1	0	0	0	1	0	180	0	0	0	200	APBD